DOKUMEN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2023

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

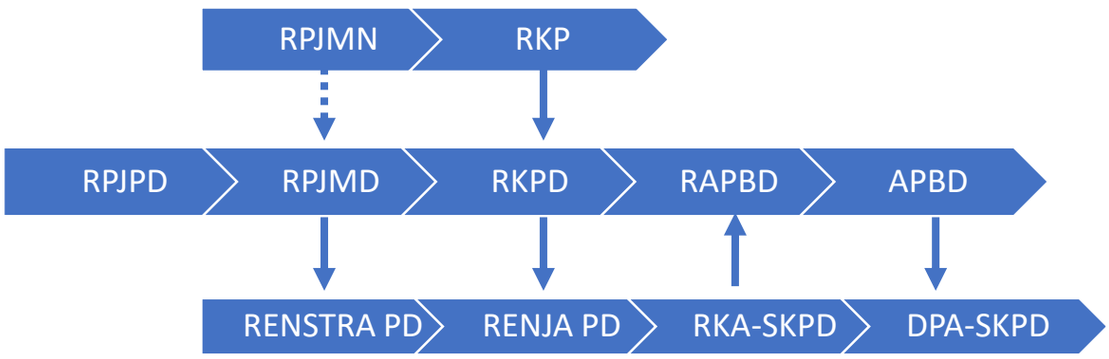
Tahapan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam

perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2.Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (kedua) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk melalui capain kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7)	11 = (10/4)
2					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2	**14**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**84,00 Nilai**	**79,75 Nilai**	**84,00 Nilai**	**82,58 Nilai**	**82,58 Nilai**	**84,00 Nilai**	**82,58 Nilai**	**98,31%**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**45 Dokumen**	**37 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**100,00%**	**8 Dokumen**	**45 Dokumen**	**100%**
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	15 Dokumen	100%
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	20 Laporan	100%
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**50 Laporan**	**40 Laporan**	**10 Laporan**	**10 Laporan**	**100,00%**	**10 Laporan**	**50 Dokumen**	**100%**
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	100%	31 Orang	31 Orang/ Bulan	100%
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Laporan	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5 Laporan	25 Laporan	100%
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25 Laporan	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	25 Laporan	100%
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**7 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2 Dokumen**	**9 Dokumen**	**100%**
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	4 Paket	4 Paket	- -	- -	-	- -	4 Paket	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3			5		6		7		8 = (7/6)			10 = (5 + 7)		11 = (10/4)
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99	Orang	31	Orang	99	Orang	99	Orang	100%	99	Orang	99	Orang	100%
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**159**	**Dokumen**	**126**	**Dokumen**	**12**	**Dokumen**	**33**	**Dokumen**	**275%**	**12**	**Dokumen**	**159**	**Dokumen**	**100%**
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	100%
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	100%
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	100%
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	100%
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	Dokumen	16	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	20	Dokumen	100%
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Laporan	44	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100%	11	Laporan	55	Laporan	100%
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	100%
2	14	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	4	Dokumen	100%
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180**	**Laporan**	**144**	**Laporan**	**36**	**Laporan**	**36**	**Laporan**	**100,00%**	**36**	**Laporan**	**180**	**Laporan**	**100%**
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	60	Laporan	100%
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	60	Laporan	100%
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	60	Laporan	100%
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**100%**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3			5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5 + 7)		11 = (10/4)
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	Unit	81	Unit	81	Unit	81	Unit	100%	81	Unit	81	Unit	100%
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	Unit	60	Unit	15	Unit	15	Unit	100%	15	Unit	75	Unit	100%
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5	Unit	4	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	5	Unit	100%
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Data Pengendalian Penduduk yang sudah valid**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**4**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**4**	**Kegiatan**	**4**	**Kegiatan**	**100%**	**4**	**Kegiatan**	**4**	**Kegiatan**	**100%**
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten /Kota	1	Dokumen	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	3	Dokumen	-	-	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	3	Satuan Pendidikan	-	-	3	Sekolah	3	Sekolah	100%	3	Sekolah	3	Satuan Pendidikan	100%
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	3	Laporan	-	-	3	Laporan	3	Laporan	100%	2	Laporan	3	Laporan	100%
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**64**	**Laporan**	**27**	**Laporan**	**37**	**Laporan**	**37**	**Laporan**	**100%**	**12**	**Laporan**	**64**	**Laporan**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3			5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5 + 7)		11 = (10/4)
2	14	02	2.02	**03**	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dokumen	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Laporan	100%
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	Laporan	-	-	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%	12	Dokumen	12	Laporan	100%
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3	Data	3	Data	-	-	-	-	-	-	-	3	Data	100%
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	Laporan	-	-	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	100%
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36	Dokumen	24	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prosentase Capaian Peserta KB (s.d TW III)**	**80,05%**		**78,17%**		**80,04%**		**78,37%**		**97,91%**	**80,04%**		**78,37%**		**97,90%**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**30**	**Dokumen**	**24**	**Dokumen**	**6**	**Kegiatan**	**6**	**Kegiatan**	**100%**	**6**	**Kegiatan**	**30**	**Dokumen**	**100%**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	25	Dokumen	20	Dokumen	5	Organisasi	5	Organisasi	100%	5	Organisasi	25	Dokumen	100%
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terwujudnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	Dokumen	4	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	4	Dokumen	100%
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	30	Dokumen	29	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	30	Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3			5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5 + 7)		11 = (10/4)
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	80	Laporan	60	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100%	20	Laporan	80	Laporan	100%
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	60	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	60	Laporan	100%
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	22	Laporan	2	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	0,00%	20	Laporan	22	Laporan	100%
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Kader**		**5160 Kader**		**5160 Kader**		**5160 Kader**		**100%**	**5160 Kader**		**5160 Kader**		**100%**
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5160 Kader		-	-	-		-	-	-	-		5160 Kader		100%
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Kader		5160 Kader		5160 Kader		5160 Kader		100%	5160 Kader		5160 Kader		100%
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**725.000 Orang**		**584.123 Orang**		**141.410 Orang**		**141.410 Orang**		**100%**	**141.410 Orang**		724.123 Orang		**9,99%**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	100%
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	725.000 Orang		584.123 Orang		141.410 Orang		141.410 Orang		100%	141.410 Orang		724.123 Orang		9,99%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3			5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5 + 7)		11 = (10/4)
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10	Laporan	9	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	10	Laporan	100%
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	36	Unit	-	-	36	Unit	36	Unit	100%	36	Unit	36	Unit	100%
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	76	Laporan	71	Laporan	5	Organisasi	5	Organisasi	100%	5	Organisasi	76	Laporan	100%
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	60	Laporan	60	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	60	Laporan	100%
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**49**	**Kampung KB**	**49**	**Kampung KB**	**49**	**Kampung KB**	**49**	**Kampung KB**	**100%**	**49**	**Kampung KB**	**49 Kampung KB**		**100%**
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	49	Kampung KB	49	Kampung KB	49	Kampung KB	49	Kampung KB	100%	49	Kampung KB	49	Kampung KB	100%
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1. Prosentase keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (s.d TW III)**	**85,00%**		**88,13%**		**85,00%**		**84,18%**		**99,04%**	**85,00%**		**84,18%**		**99,04%**
						2. Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) (s.d TW III)	**85,00%**		**77,49%**		**85,00%**		**72,63%**		**85,45%**	**85,00%**		**72,63%**		**85,45%**
						3. Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) (s.d TW III)	**85,00%**		**77,13%**		**85,00%**		**31,96%**		**37,60%**	**85,00%**		**31,96%**		**37,60%**
						4. Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan UPPKA (s.d TW III)	**85,00%**		**79,63%**		**85,00%**		**71,25%**		**83,82%**	**85,00%**		**71,25%**		**83,82%**
						5. Menurunnya persentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria (s.d TW III)	**11,20%**		**7,51%**		**11,20%**		**7,77%**		**144,14%**	**11,20%**		**7,77%**		**144,14%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3			5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5 + 7)		11 = (10/4)
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5**	**Kelompok Kegiatan**	**5**	**Kelompok Kegiatan**	**5**	**Kelompok Kegiatan**	**5**	**Kelompok Kegiatan**	**100%**		**5**	**Kelompok Kegiatan**	**5**	**Kelompok Kegiatan**	**100%**
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	49	Unit	29	Unit	20	Unit	20	Unit	100%	20	Unit	49	Unit	100%
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	100	Orang	80	Orang	20	Orang	20	Orang	100%	20	Orang	100	Orang	100%
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan Biaya Operasional	2550	Orang	2550	Orang	2550	Orang	2550	Orang	100%	2550	Orang	2550	Orang	100%
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	25	Laporan	20	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100,00%	5	Laporan	25	Laporan	100%
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10	Laporan	9	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	10	Laporan	100%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**82,58 %**	**Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**78,37 %**	**Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Pengendalian Penduduk	**100%**	**Sangat Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**53,56%**	**Rendah**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS)	Kurang tercapainya Target Kinerja	Berkoordinasi dengan Penyuluh KB pada Wilayah Sasaran
Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin mempunyai anak segera.	Kurang tercapainya Target Kinerja	Berkoordinasi dengan Penyuluh KB pada Wilayah Sasaran

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk s.d Triwulan III Tahun 2023

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 s.d TW III	Tahun 2024	
1.	Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,88	1,83	1,73	-	2,00	TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sehingga realisasinya tidak bisa dibagi per Tribulan/per Semester.
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	-	80,05%	80,01%	80,02%	80,03%	80,04%	80,05%	79,36%	78,46%	78,17%	78,37%	80,05%	- Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang Hamil. - Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	-	11,40%	-	-	-	-	11,40%	9,20%	9,66%	10,05%	10,17%	11,40%	- Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb. - Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.
4.	Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	-	-	-	87,00%	88,00%	89,00%	-	-	76,54%	81,29%	56,50%	-	- Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS). - Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin mempunyai anak segera.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan, Sosialisasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Optimalisasi Kerjasama dengan BKKBN untuk mendukung Penguatan SDM, Sistem Informasi dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
3. Inovasi peningkatan kepesertaan KB melalui Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah dan Lembaga terkait lainnya untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
5. Peningkatan sinergitas dan dukungan Percepatan Penurunan Stunting dengan pihak ketiga.
6. Optimalisasi dan integrasi Sistem Satu Data untuk data Stunting dengan Lintas Sektor.
7. Optimalisasi pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk meminimalisir terjadinya Stunting baru pada Balita

2.3.2. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah.

Upaya-upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan personil Penyuluh Keluarga Berencana yang ada.
2. Menyajikan Data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang akurat dan terpublikasi.

3. Melakukan motivasi kepada para Penyuluh KB serta Kader KB guna menggerakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan program KB.
4. Mengoptimalkan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) disetiap kecamatan bersama lintas sektoral.
5. Meningkatkan Kepesertaan KB MKJP.
6. Memberikan *reward* kepada akseptor KB MOP dan MOW.
7. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi.
8. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Remaja. Dan perencanaan berkeluarga cegah stunting.
9. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA).

2.3.3. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yaitu :

"Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK)"

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk;
c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK;
g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hambatan dan Permasalahan dalam melaksanankan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP.
2. Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) perlu pembinaan menjadi Peserta KB.
3. Masih terdapat keluarga beresiko stunting yang perlu mendapat pendampingan.
4. Adanya keterbatasan daya dukung (Kapasitas SDM dan Kestabilan sistem Informasi Pusat) dalam validasi data KB
5. Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum maksimal .
6. Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) masih belum maksimal.
7. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum maksimal.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3.4.1 Tantangan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja.
2. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nganjuk.
3. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah, karena Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP
4. Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum maksimal.
5. Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) perlu pembinaan menjadi Peserta KB.
6. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal
7. Perlunya penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB termasuk penguatan data dan informasi kependudukan dan KB bersama stakeholder/seluruh elemen masyarakat.
8. Data kependudukan (data migrasi masuk, data migrasi keluar, jumlah kelahiran, jumlah kematian) masih sangat tergantung pada ketersediaan data lintas sektor.
9. Masih terdapat keluarga beresiko stunting yang perlu mendapat pendampingan.
10. Adanya keterbatasan daya dukung (Kapasitas SDM dan Kestabilan sistem Informasi Pusat) dalam validasi data KB
11. Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) masih belum maksimal.
12. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum maksimal.

2.3.4.1. Peluang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun peluang yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholder dalam rangka advokasi dan sosialisasi program keluarga berencana dan ketahanan keluarga.
2. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Program Nasional.
3. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga akseptor menjadi perhatian

2.3.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah masyarakat guna tercapainya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

2.3.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam pemberian Pelayanan KB dan Pendampingan Keluarga adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, TNI, POLRI, IBI, PKK, Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).

Dalam upaya pemberian layanan Edukasi terkait Kesehatan Reproduksi dan Kesiapan Pra Nikah Dinas PPKB bermitra dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

2.3.7. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA**", dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Berikut ini merupakan tujuan pembangunan daerah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Tujuan "Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk" dan Sasaran "Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas".

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi

semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, Dinas PPKB memberikan kontribusi sebagai OPD pendukung pencapaian 17 Tujuan TPB.

Tabel 2.7

Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2022

No.	Tujuan/Target/ Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	

NIHIL

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2022

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah “Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas”.

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga,kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan Ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				18.354.312.810					**18.354.312.810**
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**84,00 Nilai**	**7.536.256.060**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**84,00 Nilai**	**7.536.256.060**
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**11 Dokumen**	**34.083.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**11 Dokumen**	**34.083.000**
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.220.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.220.000
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.320.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.320.000
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.543.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.543.000
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22 Dokumen**	**4.433.188.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22 Dokumen**	**4.433.188.000**
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	4.414.558.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	4.414.558.000
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	11.178.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	11.178.000
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5 Laporan	7.452.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5 Laporan	7.452.000
2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**235.380.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**235.380.000**
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	19.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	19.800.000
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	215.580.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	215.580.000
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33 Kegiatan**	**603.700.360**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33 Kegiatan**	**603.700.360**
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.237.460	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.237.460

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	201.947.350	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	201.947.350
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.627.050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.627.050
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.387.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.387.500
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.500.000
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.025.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.025.000
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.006.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.006.000
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.970.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.970.000
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**1.020.297.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**1.020.297.500**
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.657.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.657.500
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.400.000
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	931.240.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	931.240.000
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**92 Unit**	**1.209.607.200**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**92 Unit**	**1.209.607.200**
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 unit	220.513.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 unit	220.513.200
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	57.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	57.950.000
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	931.144.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	931.144.000

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi** **Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal**	**92,00%** **3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**751.617.450**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi** **Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal**	**92,00%** **3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**751.617.450**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**24 Kegiatan**	**276.617.450**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**24 Kegiatan**	**276.617.450**
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	40.450.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	40.450.000
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	5 Laporan	169.683.450	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	5 Laporan	169.683.450
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	15 Dokumen	66.484.000	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	15 Dokumen	66.484.000
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**25 Laporan**	**475.000.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**25 Laporan**	**475.000.000**
2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Dokumen	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Dokumen	150.000.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	275.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	275.000.000
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prosentase Peserta KB Aktif**	**80,06%**	**9.288.939.300**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Prosentase Capaian Peserta KB**	**80,06%**	**9.288.939.300**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**6 Kegiatan**	**787.531.000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**6 Kegiatan**	**787.531.000**
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	787.531.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	787.531.000
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Orang**	**7.291.193.300**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Orang**	**7.291.193.300**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Orang	7.291.193.300	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Orang	7.291.193.300
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**145.000 Orang**	**910.215.000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**145.000 Orang**	**910.215.000**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	11.715.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	11.715.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	145.000 Orang	886.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	145.000 Orang	886.000.000
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	12.500.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	12.500.000
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**49 Kampung KB**	**300.000.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**49 Kampung KB**	**300.000.000**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	49 Kampung KB	300.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	49 Kampung KB	300.000.000
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1. Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)** **2. Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun**	**89,02%** **10,10%**	**777.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**1. Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)** **2. Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun**	**89,02%** **10,10%**	**777.500.000**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**	**777.500.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**	**777.500.000**
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	202.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	202.000.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	5 Laporan	350.500.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	5 Laporan	350.500.000
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50 Orang	225.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50 Orang	225.000.000

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 mengangkat tema "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah "Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,33
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,06
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,30

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **“Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas”**

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar

Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2025	Pelaksana

NIHIL

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
1.	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	18.354.312.810

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)
1.	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00	751.617.450
		Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,06	9.288.939.300
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,30	777.500.000

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF
		URAIAN (OUTPUT)	TARGET	
				18.354.312.810
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**84,00 Nilai**	**7.536.256.060**
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**11 Dokumen**	**34.083.000**
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.220.000
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.320.000
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.543.000
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22 Dokumen**	**4.433.188.000**
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	4.414.558.000
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	11.178.000
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	7.452.000
2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**235.380.000**
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	19.800.000
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	215.580.000
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33 Kegiatan**	**603.700.360**
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.237.460
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	201.947.350
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.627.050
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.387.500
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.500.000
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.025.000
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.006.000
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.970.000
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**1.020.297.500**
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.657.500
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.400.000
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	931.240.000
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**92 Unit**	**1.209.607.200**
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 unit	220.513.200

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF
		URAIAN (OUTPUT)	TARGET	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	57.950.000
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	931.144.000
2.14.202	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi** **Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal**	**92,00%** **3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**751.617.450**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**24 Kegiatan**	**276.617.450**
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	40.450.000
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	5 Laporan	169.683.450
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	15 Dokumen	66.484.000
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**25 Laporan**	**475.000.000**
2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Dokumen	150.000.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	275.000.000
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prosentase Peserta KB Aktif**	**80,06%**	**9.288.939.300**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**6 Kegiatan**	**787.531.000**
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	787.531.000
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Orang**	**7.291.193.300**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Orang	7.291.193.300
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**145.000 Orang**	**910.215.000**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	11.715.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	145.000 Orang	886.000.000
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	12.500.000

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF
		URAIAN (OUTPUT)	TARGET	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**49 Kampung KB**	**300.000.000**
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	49 Kampung KB	300.000.000
2.14.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1. Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)** **2. Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun**	**89,02%** **10,10%**	**777.500.000**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**	**777.500.000**
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	202.000.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	5 Laporan	350.500.000
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50 Orang	225.000.000

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	

NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Nganjuk, Desember 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005